



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghubungkan konsistensi perencanaan lima tahunan (RPJMD) dengan RKPD. RPJMD harus dilaksanakan melalui RKPD, maka arah kebijakan tahap demi tahap dalam RPJMD harus dilaksanakan dan dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan mengidentifikasi usulan prioritas dari berbagai sumber / telaahan dan mengevaluasi hasil review atas prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2015 adalah pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 % sampai dengan 6,3 % serta laju inflasi 4,5 bertambah atau berkurang 1 %. Adapun isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 sebagai berikut :

1.	Bidang Sosbud dan kehidupan beragama ; sistem jaminan sosial Nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan.
2.	Bidang pembangunan ekonomi ; transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja
3.	Bidang pembangunan sarana prasana ; penguatan konektivitas Nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi Nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air
4.	Bidang pembangunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ; perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup
5.	Bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ; perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi
6.	Bidang pembangunan politik ; konsolidasi demokrasi
7.	Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan ; percepatan pembangunan <i>Minimum</i>



	<i>Essensial Force</i> (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri
8.	Bidang pembangunan hukum dan aparatur ; reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
9.	Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang ; pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan resiko bencana dan sinergi pembangunan perdesaaan

RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dan beberapa prioritas lainnya yang secara lebih lengkap dijabarkan sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu :

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.



- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Bidang Pekerjaan Umum.
- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

Millenium Development Goals (MDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RKPD Kabupaten Lamandau adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia termasuk Lamandau untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing.

Konsep MDGs berawal dari adanya pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari :

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;



4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Post 2015 Development Agenda

Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 pergeseran transformasi utama, yaitu :

- a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan



bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya-yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

e. Membina kemitraan global baru

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacar dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan tahun ke - 2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, dan juga merupakan periode kedua dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 memuat visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau 2015, karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama ke depan. Isu strategis Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pendidikan
2. Peningkatan akses pelayanan di bidang kesehatan
3. Penyerapan angkatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja
4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah
6. Peningkatan ketahanan pangan
7. Reformasi Birokrasi yang bersifat melayani masyarakat
8. Pengembangan infrastruktur daerah untuk menunjang pembangunan ekonomi

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan Misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013- 2018 diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran akan diperlihatkan di tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamandau

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa				
No.	Misi	Tujuan	No	Sasaran
1	Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.
			2	Meningkatnya ketahanan pangan



	pengangguran masyarakat sejahtera.	sehingga			masyarakat.
			Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.	3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.
				4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha.
				5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.		Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.
				7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.
				8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.
				9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara
3	Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
				11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.
			Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan.	12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.
4	Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.		Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.
				14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.
				15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat
				16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
5	Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.		Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.	17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.
				18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
				19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.



		Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.
			22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			24	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
			25	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
			26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
8	Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.
			28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
9	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata
			30	Meningkatnya jumlah wisatawan
10	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Berdasarkan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi tahun 2015, maka tema pembangunan tahun 2015 adalah **“PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMANDAU”**. Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Prioritas 1 : Ekonomi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan cara menaikkan income per kapita melalui usaha di berbagai bidang.

Prioritas 2 : Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru serta meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Prioritas 3 : Kesehatan

Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu dan Polindes.

Prioritas 4 : Keamanan dan Ketentraman

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penyelesaian sengketa lahan dan konflik sosial lainnya.

Prioritas 5 : Infrastruktur

1. Membuka akses jalan desa yang belum terhubung.
2. Peningkatan jalan menuju ibukota kecamatan.
3. Pembangunan alun-alun di pusat kota Nanga Bulik.
4. Pembangunan terminal AKAP dan bandara.
5. Peningkatan akses komunikasi di kecamatan.
6. Peningkatan pembangunan jaringan listrik di seluruh kecamatan.

Prioritas 6 : Pemerintahan

Meningkatkan kapasitas pemerintah dan melanjutkan reformasi birokrasi serta pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Prioritas 7 : Olahraga dan kebudayaan

Meningkatkan sarana prasarana olahraga dan pembinaan prestasi olahraga serta meningkatkan kebudayaan sebagai pendukung kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Lamandau.

Prioritas 8 : Keagamaan

Meningkatkan persatuan yang kuat antara pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau.

Prioritas 9 : Pariwisata

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta menjadikan pariwisata sebagai kekuatan inti ekonomi masyarakat Kabupaten Lamandau.

Prioritas 10 : Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup yang lestari dan berwawasan lingkungan.

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Sasaran Prioritas	Strategi	Program / Pembangunan	Indikator	Target	SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah	Ekonomi	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	cakupan penghijauan dan reboisasi	50.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	rasio pencegahan, pengendalian dan penindakan ilegal logging	1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program perencanaan dan pengembangan hutan	cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan	10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan	persentase penyuluh yang dibina	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	persentase peningkatan produksi hutan	3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	persentase peningkatan jumlah SDM perkebunan	2	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu	produksi gaharu	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Ekonommi	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase binaan Kelompok Tani	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan binaan kelompok tani	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah	ketersediaan pangan (beras)	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	jumlah desa mandiri pangan	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	99,25	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Padi (Ton)	24.563,88	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Jagung (Ton)	25,96	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Kedelai (Ton)	11,72	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Kacang Tanah (Ton)	10,68	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Kacang Hijau (Ton)	7,93	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Ubi Kayu (Ton)	119,54	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Ubi Jalar (Ton)	71,75	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Tanaman Buah (Ton)	4636,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Sayuran(Ton)	2834,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) pertahun	8.660.788	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	91,91	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	400,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	2,89	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Produksi daging	689,76	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Produksi telur	36,78	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Populasi Sapi Potong (Ekor)	3.145	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			Populasi Kerbau (ekor)		Dinas Pertanian,



				-	Peternakan dan Perikanan
			Populasi Kambing (Ekor)	3.544	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Domba (ekor)	196	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Babi (Ekor)	11.009	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Ayam Buras (Ekor)	69.985	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	-	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Ayam Ras Pedaging (Ekor)	16.199	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Populasi Itik (Ekor)	32.998	Dinas Pertanian, dan Perikanan
		Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	1212,00	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Produksi Benih	0,90	Dinas Pertanian, dan Perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pemasaran Produksi Tanaman Hortikultura	1.867,50	Dinas Pertanian, dan Perikanan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	213,47	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Padi Sawah(Ton)	30,00	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Padi Ladang(Ton)	21,26	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Jagung (Ton)	25,96	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Kedelai (Ton)	11,72	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Kacang Tanah (Ton)	10,68	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Kacang Hijau (Ton)	7,93	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Ubi Kayu (Ton)	119,54	Dinas Pertanian, dan Perikanan
			Ubi Jalar (Ton)	71,75	Dinas Pertanian, dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Kontribusi pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	4,06	Dinas Pertanian, dan Perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Pemasaran Ternak pertahun	35.110	Dinas Pertanian, dan Perikanan
				34.946	Distanakan
				129	Dinas Pertanian, dan Perikanan



					<i>Perikanan</i>
				35	<i>Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan</i>
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Bibit Ternak	72,03	<i>Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan</i>
		Peningkatan Ketahanan Pangan	peningkatan pemanfaatan lahan terlantar	60	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	pendapatan petani kebun	400-800	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing	Ekonomi	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Cakupan UKM aktif	800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan jumlah barang berbahaya/kadaluarsa di masyarakat	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM binaan	800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM	800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UMKM yang dapat KUR	80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan Ekspor	18.704.930	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	113	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program penataan struktur industri	Usaha Mikro dan Kecil	1622	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tingkat pertumbuhan industri	48	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	cakupan sumber daya produktif	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi	cakupan koperasi yang dibina	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi	cakupan pelatihan bagi SDM koperasi	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMKM	cakupan UMKM binaan	10,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil



					dan Menengah
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	cakupan pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri	cakupan iptek industri	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	cakupan teknologi industri	80,00	Disperindagkop UMKM
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	83	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	290	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Ekonomi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	75,00	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi PMDN dan PMA	91,91	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program kerjasama antardaerah dan luar negeri	Cakupan Kerjasama yang terlaksana	80	Sekretariat Daerah
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	Ekonomi	Program perencanaan pembangunan ekonomi	rasio penduduk miskin	4,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	97,95	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0,25	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK pendidikan dasar sembilan tahun	113,81	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Pendidikan Menengah	APK Pend. Menengah	65	Disdikjar
		Program Pendidikan Non Formal	APK Pendidikan Non Formal	54	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	43,57	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	50	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Pendidikan Perguruan Tinggi	APK Pendidikan Tinggi	20	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	350	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda	Olahraga dan Kebudayaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Jumlah Prestasi Kepemudaan	0,25	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Oraganisasi Kepemudaan	20	Dinas Pemuda dan Olahraga
			3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pembinaan Pramuka	Jumlah Pembinaan Pramuka	0,081481481	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.	Cakupan Kajian Kebijakan Pemuda	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Cakupan Kebijakan Bidang Olah Raga	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya	Keamanan dan ketentraman	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	Persentase Kasus Narkoba	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Keamanan dan ketentraman	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausahaan muda yang terdidik	0,3	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk	1,94	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan	tipe D	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan operasi katarak	34	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah mobil ambulans/mobil jenazah yang diadakan	1	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah gedung rumah sakit yang dipelihara rutin/berkala	29	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kandungan limbah sesuai standar	1	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis	Jumlah dan jenis dokter spesialis yang disediakan	4	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	90,00	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	33,60	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan rumah sehat	70,00	Dinas Kesehatan



			Usia Harapan Hidup	67,36	Dinas Kesehatan
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin	30,00	Dinas Kesehatan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	96,00	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI ada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100,00	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan UCI	92,77	Dinas Kesehatan
			Presentase penemuan pasien baru TB BTA positif	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan kasus malaria yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	Dinas Kesehatan
			Penderita DBD yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Penderita diare yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Cakupan penjarangan kesehatan anak SD dan setingkat	31,30	Dinas Kesehatan
		Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan	4,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana	Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	90,26	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan nifas	84,83	Dinas Kesehatan
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,83	Dinas Kesehatan
			Cakupan kunjungan bayi	95,63	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan anak balita	78,80	Dinas Kesehatan



			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0,00	Dinas Kesehatan
			Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	17,70	Dinas Kesehatan
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Keluarga Berencana	Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif	10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,005	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Meningkatnya pelayanan KB baru dan KB aktif	5	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	23,27	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase penyuluhan pada remaja	10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	pkk aktif	50%	Kecamatan Bulik Timur
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	pkk aktif	50%	Kecamatan Bulik
		Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	40	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	40	Kecamatan Mentohi Raya
		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Jumlah PKK yang aktif	53	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara	Keamanan dan Ketentraman	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi



					dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	0,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Dukungan Kelancaran Pemilu	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	1	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase penanganan demonstrasi/penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah	1	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah patroli anggota Satpol PP	96	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas desa/kelurahan	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Presentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase penegakan perda	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah LPM yang berprestasi	3 desa	Inspektorat



		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya BBGRM	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Bulik Timur
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Bulik
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Lamandau
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Delang
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Mentohi Raya
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kecamatan Batang Kawa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Badan PP dan KP
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah LPM yang berprestasi	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana	Ekonomi	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	23,07	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	75,25	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	80,17	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	22,49	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina	50,51	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	50	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



			dan Penanggulangan Bencana Alam		
		Program Pasca Bencana	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	42%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program Tanggap Darurat	Tingkat waktu tanggap	2,2 jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Keamanan dan ketentraman	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	Kecamatan Lamandau
		Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	Kecamatan Delang
		Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	Kecamatan Batang Kawa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang dibantu	12,04819277	Dinas Pertambangan dan Energi
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	Infrastruktur	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	71%	Dinas Pekerjaan Umum
			Jembatan kabupaten dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	84,462	Dinas Pekerjaan Umum
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	94,46	Dinas Pekerjaan Umum
		Program pembangunan jalan lingkungan	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	80	Dinas Pekerjaan Umum
		Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	94,46	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			Pelabuhan Laut	2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			Pelabuhan Udara	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			Terminal Bis	1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	pelanggaran lalu lintas	1402	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	cakupan rambu terpasang persentase	11%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Lingkungan pemukiman kumuh	1,53	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	1:55	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1:08	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	persentase TPU yang dibina	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pemeliharaan Kebersihan	persentase sampah tertangani		Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan	Rumah tangga pengguna air bersih	31,56	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	cakupan database jalan dan jembatan	90	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru	Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran	2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan	Infrastruktur	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	92,742	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,58	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rumah tangga pengguna air bersih	31,56	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	80	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengendalian Banjir	persentase wilayah banjir tertangani	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan			Dinas Pekerjaan Umum
		Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,58	Dinas Pekerjaan Umum
		Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal	Persentase rumah tinggal bersanitasi	31,56	Dinas Pekerjaan Umum
		Penataan Fasilitas Umum	cakupan fasilitas umum yang tertata	80	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pemeliharaan Kebersihan	Persentase sampah tertangani	80	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	rasio TPS per satuan penduduk	1:18	Badan Lingkungan Hidup
		Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Ratio elektrifikasi	54,22	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan	Ratio Jumlah Rumah Tangga berlistrik	11052	Dinas Pertambangan dan Energi
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	20	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Perencanaan Kota	persentase perencanaan kota		Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan dan Penataan Taman	persentase taman yang tertata	100	Dinas Pekerjaan Umum



		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,24	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya pertambangan yang tidak memiliki izin	350	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas	cakupan perusahaan minyak dan gas yang ditata	80	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana	167343	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Pengelolaan Air Tanah	Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah	-	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Penataan Wilayah Pertambangan	Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal	525	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal	Olahraga dan Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan keikutsertaan dalam festival seni dan budaya	5	Kecamatan Bulik Timur
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Bulik
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Lamandau
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Delang
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Menthobi Raya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Olahraga dan Budaya	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah Kegiatan Olahraga	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
			3. Jumlah Organisasi Olahrag	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung dan Lapangan Olah Raga	9	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	cakupan referensi dan literatur pemerintah desa	blm ada	Sekretariat Daerah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			Penyampaian LKPD	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			Tertib administrasi BMD	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan



					dan Aset Daerah (SKPD)
			Rasio pemanfaatan aset	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Bulik Timur
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Bulik
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Delang
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Mentholi Raya
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah koordinasi yg dilakukan	100	Sekretariat Daerah
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	% perda yg disosialisasikan dan ditetapkan	100	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Sarana Perekonomian	jmlh koordinasi monev raskin	94	Sekretariat Daerah
		Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	jmlh UMKM yang memiliki basic skill	10	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Cakupan penerapan SOP SKPD	tidak	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan	jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu	5	Sekretariat Daerah
		Program Kesejahteraan Rakyat	jmlh koordinasi kesra	90	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH	100	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi	cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi	blm ada	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Inspektorat
		Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase auditor yang memiliki sertifikasi JFA	44,44	Inspektorat
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)



		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	86,07	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	20,24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	0	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Kecamatan Lamandau
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	Kecamatan Lamandau
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Lamandau
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Kecamatan Batang Kawa
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Batang Kawa
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan	244	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang	70	Dinas Kesehatan



			memiliki kompetensi sesuai bidangnya		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Lingkungan Hidup
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB



		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Sekretariat Daerah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Sekretariat Daerah
		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	persentase aparatur yang meninggal dalam	5	Sekretariat Daerah



			masa jabatan		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Sekretariat Daerah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% penerapan e-government	5	Sekretariat Daerah
		Program Pembangunan Informasi	% meningkatnya penyebaran informasi	85	Sekretariat Daerah
		Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum	penyelesaian kasus bantuan hukum	5	Sekretariat Daerah
		Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum	jumlah desa sadar hukum	1	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Sekretariat DPRD
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Sekretariat DPRD
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun	0,75	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Inspektorat
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Inspektorat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Tersedianya tingkat IKM	2,803(70,07)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan layanan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	0	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal



		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Bulik Timur
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Bulik Timur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Bulik Timur
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Bulik
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Bulik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Bulik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Lamandau
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Lamandau
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Delang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Delang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Mentohi Raya
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Mentohi Raya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Mentohi Raya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Belantikan Raya
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kecamatan Batang Kawa
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kecamatan Batang Kawa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kecamatan Batang Kawa



		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	Dinas Pertambangan dan Energi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pekerjaan Umum



		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Lingkungan Hidup
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Sekretariat Daerah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	cakupan pelayanan keuangan daerah	100	Sekretariat Daerah
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	% tersedianya jumlah lahan bersertifikat	9,7	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Sekretariat DPRD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Inspektorat
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah temuan yang ditindaklanjuti	33,67	Inspektorat
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang memiliki APBDes	90	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi	100	Kecamatan Bulik Timur



			perkantoran		
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	Kecamatan Bulik Timur
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Bulik Timur
			persentase Karang taruna aktif	70%	Kecamatan Bulik Timur
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Bulik
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	Kecamatan Bulik
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Lamandau
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Delang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Menthobi Raya
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kecamatan Batang Kawa
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	Kecamatan Batang Kawa
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Pemerintahan	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan dokumen kebinamargaan	100	Dinas Pekerjaan Umum
		Program pengembangan data/informasi	Profil daerah	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PDRB	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Daerah dalam angka	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Profil daerah	ada	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan daerah	RJPD	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



			RPJMD	ada	
			RKPD	ada	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan jumlah jaringan komunikasi	3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang	13%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi	jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	cakupan sosialisasi kominfo	80	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan	10%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Program Peningkatan Pelayanan masyarakat	cakupan sosialisasi perhubungan	80	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	78%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			penerbitan akte kelahiran	68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Rasio pasangan berakte nikah	41,6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Kepemilikan KTP	78,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	67,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD dan desa/kel.yang menerapkan pengelolaan arsip baku	tidak ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	tidak ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah dan jenis arsip daerah	tidak ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Penyusunan Data dan Informasi	cakupan ketersediaan dokumen kehutanan dan perkebunan	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama	Keagamaan	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan ajang perlombaan yang diikuti	80	Kecamatan Bulik Timur
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Bulik
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Lamandau
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Delang
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Menthobi Raya



		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Belantikan Raya
		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan	Keagamaan	Program Bidang Keagamaan	jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamaan	9	Sekretariat Daerah
Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Pariwisata	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	RSUD Lamandau
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi	1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	persentase tingkat partisipasi skpd	0	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	% masyarakat pengelola aset budaya	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Inspektorat
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	BKPP
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Bulik Timur
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Bulik
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Lamandau
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Delang
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Sematu Jaya
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Mentohi Raya
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Belantikan Raya



		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kecamatan Batang Kawa
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatkan daya saing pariwisata	Pariwisata	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan tempat	0	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	63,33	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	37,5	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program pengembangan destinasi pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	25	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			Jumlah Pelaku Budaya	0	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		Program pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup (jumlah perusahaan)	33	Badan Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1	Badan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH	4	Badan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik	80	Badan Lingkungan Hidup
		Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup	100	Badan Lingkungan Hidup
		Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	cakupan permukiman bersanitasi	80	Badan Lingkungan Hidup

